



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	: 44 (<i>empat puluh empat</i>)
Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: V
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI
Hari, Tanggal	: Senin, 4 Juli 2022
Pukul	: 13.00 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: Mohamad Hekal, M.B.A/Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	: Pengambilan Keputusan terhadap usulan BUMN Penerima Penyertaan Modal Negara Tahun 2023 dan Inisiatif <i>Corporate Action</i> 2022.
Hadir	: 1. 43 orang dari 55 orang Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Menteri BUMN RI, Saudara Erick Tohir; Beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI pada pukul 13.18 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada hari Senin, 4 Juli 2022, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohamad Hekal, M.B.A.

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara Tunai tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebesar Rp10.000.000.000.000 (*Sepuluh Triliun Rupiah*) yang akan digunakan untuk Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk sektor Pembangkit, Transmisi, Gardu Induk dan Distribusi, termasuk di dalamnya pelaksanaan Program Listrik Desa dan Pembangkit EBT (Penugasan).
 - b. PT LEN Industri (Persero)/Defend ID sebesar Rp3.000.000.000.000 (*Tiga Triliun Rupiah*) yang akan digunakan untuk Pembangunan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi radar, pesawat, kapal, amunisi, medium tank, kendaraan tempur dan modernisasi senjata (Pengembangan Usaha)
 - c. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food sebesar Rp2.000.000.000.000 (*Dua Triliun Rupiah*) yang akan digunakan dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional (Pengembangan Usaha).
 - d. PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp30.561.000.000.000 (*Tiga Puluh Triliun Lima Ratus Enam Puluh Satu Miliar Rupiah*) yang akan digunakan untuk Pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang terdiri atas PMN konstruksi JTTS Tahap I dan Tahap II.
 - e. PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero)/In Journey sebesar Rp9.500.000.000.000 (*Sembilan Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah*) yang akan digunakan untuk Penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi, pengembangan infrastruktur pariwisata dan infrastruktur aviassi, serta pembebasan lahan dan penyelesaian proyek kawasan KEK Mandalika (Penugasan dan Pengembangan Usaha).
 - f. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)/IFG sebesar Rp6.000.000.000.000 (*Enam Triliun Rupiah*) yang akan digunakan untuk Pelaksanaan penugasan penjaminan KUR yang dijalankan oleh PT Jamkrindo dan PT Askrindo (Penugasan).
 - g. PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp4.100.000.000.000 (*Empat Triliun Seratus Miliar Rupiah*) yang akan digunakan dalam rangka memenuhi setoran modal porsi Indonesia untuk penambahan pembiayaan proyek KCJB.
 - h. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sebesar Rp3.000.000.000.000 (*Tiga Triliun Rupiah*) yang akan digunakan dalam rangka perbaikan tingkat kesehatan untuk mendapatkan rating internasional guna penguatan kapasitas bisnis perusahaan (Pengembangan Usaha).

- i. Perum DAMRI sebesar Rp867.000.000.000 (*Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Miliar Rupiah*) yang akan digunakan dalam rangka penyediaan armada untuk penugasan perintis, KSPN, armada bus listrik untuk perkotaan melalui *buy the service* dan untuk meningkatkan kapasitas bisnis perusahaan (Penugasan dan Pengembangan Usaha).
 - j. Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia/AirNav Indonesia sebesar Rp790.000.000.000 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Miliar Rupiah*) yang akan digunakan dalam rangka mencapai *seamless Air Traffic Management (ATM)* di kawasan regional serta mendukung program strategis pemerintah melalui modernisasi ATM sistem (Penugasan).
 2. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara Non Tunai tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. PT LEN Industri (Persero)/Defend ID sebesar Rp838.400.000.000 (*Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Juta Rupiah*) yang akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan perbaikan kinerja perusahaan. PMN Non Tunai merupakan Konversi RDI/SLA dan Eks BPPN, angka posisi per 31 Maret 2022 dan akan berubah pada saat konversi dilakukan.
 - b. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food sebesar Rp2.609.070.000.000 (*Dua Triliun Enam Ratus Sembilan Miliar Tujuh Puluh Juta Rupiah*) yang akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan perbaikan kinerja perusahaan. PMN Non Tunai merupakan Konversi RDI/SLA dan Eks BPPN, angka posisi per 31 Maret 2022 dan akan berubah pada saat konversi dilakukan.
 3. Komisi VI DPR RI menyetujui inisiatif *Corporate Action*, antara lain :
 - a. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk akan menjual saham jenis Saham dalam Portepel dengan metode privatisasi *Right Issue* yang akan digunakan untuk Pembayaran Utang dan Pengembangan Usaha dan Komisi VI mengusulkan Kementerian BUMN untuk mempertimbangkan keterlibatan BUMN lain dalam pelaksanaan aksi korporasi ini.
 - b. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk akan menjual saham jenis Saham dalam Portepel dengan metode privatisasi *Right Issue* sesuai dengan persetujuan Inbreng Semen Baturaja pada Semen Indonesia sebagai implementasi kebijakan Kementerian BUMN dalam melakukan integrasi BUMN Sub Kluster Semen demi penguatan BUMN dalam persaingan industri semen.
 - c. PT Waskita Karya (Persero) Tbk akan menjual saham jenis Saham dalam Portepel dengan metode privatisasi *Right Issue* sesuai dengan persetujuan PMN TA 2022 sebesar Rp3.000.000.000.000 (*Tiga Triliun Rupiah*).

- d. PT Adhi Karya (Persero) Tbk akan menjual saham jenis Saham dalam Portepel dengan metode privatisasi *Right Issue* sesuai dengan persetujuan PMN TA 2022 sebesar Rp1.980.000.000.000 (*Satu Triliun Sembilan Ratus Delapan Puluh Miliar Rupiah*).
 - e. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk akan menjual saham jenis Saham dalam Portepel dengan metode privatisasi *Right Issue* sesuai dengan persetujuan PMN TA 2022 sampai dengan Rp2.980.000.000.000 (*Dua Triliun Sembilan Ratus Delapan Puluh Miliar Rupiah*) dari cadangan pembiayaan investasi.
 - f. PT Semen Kupang akan menjual Saham Pemerintah dengan metode Privatisasi penjualan saham secara langsung kepada investor.
 - g. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam hal tambahan Penyertaan Modal Negara dari Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2022 kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp7.500.000.000.000,- (*tujuh triliun lima ratus miliar rupiah*) yang akan digunakan untuk memperkuat permodalan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, serta penjualan saham jenis saham dalam portepel dengan metode *right issue* PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dalam rangka tindak lanjut persetujuan PMN TA 2022 sebesar Rp7.500.000.000.000,- (*tujuh triliun lima ratus miliar rupiah*); konversi utang obligasi wajib konversi sebesar Rp1.000.000.000.000,- (*satu triliun rupiah*) oleh Pemerintah; Penyertaan modal dari pemegang saham lain dan (atau) publik; serta konversi hutang menjadi saham dari nilai *claim settlement* kreditur.
4. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN untuk memperhatikan seluruh catatan/pandangan Fraksi-Fraksi di Komisi VI DPR RI terkait dengan persetujuan PMN Tahun 2023 dan inisiatif *Corporate Action* tahun 2022 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan ini.
 5. Jika dalam proses pengajuan usulan PMN Tahun 2023 dalam RAPBN TA 2023, terdapat perbedaan terkait nilai dana, tujuan penggunaan dan/atau entitas BUMN dengan yang diputuskan di Komisi XI DPR RI dan/atau Badan Anggaran maka Kementerian BUMN RI segera menyampaikan hal-hal tersebut kepada Komisi VI DPR RI untuk mendapatkan persetujuan kembali atas perbedaan tersebut.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 15.35 WIB.

MENTERI BUMN RI

Ttd.

ERICK THOHIR

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

Ttd.

**MOHAMAD HEKAL, M.B.A
A-103**